

Analisis Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pembayaran pada Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah

Alice Rita Saranga^{1*}, Baharuddin², Mika Malissa³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

Alice_ritasaranga@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan SPM secara umum telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala utama, antara lain keterlambatan penyampaian dokumen pendukung, kurangnya pemahaman aparatur mengenai sistem keuangan daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten. Faktor-faktor tersebut berdampak pada lamanya waktu penyelesaian SPM dan berpotensi menghambat pencairan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, penguatan koordinasi antarbagian, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang lebih optimal untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kata kunci: prosedur, Surat Perintah Membayar, pengelolaan keuangan, Dinas PUPR, Papua Tengah

Abstract

This study aims to analyze the procedure for issuing Payment Orders (SPM) at the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Central Papua Province. The research focuses on the effectiveness, efficiency, and challenges encountered in the issuance process. A qualitative descriptive method was employed, utilizing interviews, direct observation, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the issuance procedure generally complies with applicable regulations. However, several obstacles were identified, including delays in submitting supporting documents, limited understanding of regional financial systems among staff, and inadequate human resource capacity. These factors contribute to delays in the completion of SPM, potentially hindering budget disbursement. The study recommends strengthening staff capacity through technical training, improving inter-unit coordination, and optimizing the use of integrated financial information systems to enhance transparency and accountability in public financial management.

Keywords: procedure, Payment Order, financial management, PUPR Office, Central Papua

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait pencairan anggaran di Dinas PUPR. Permasalahan keterlambatan penerbitan SPM sering ditemui dalam praktik, yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek pembangunan dan penyediaan layanan publik (Ghozali, Purwanto, & Januarti, 2018). Penelitian di berbagai sektor pemerintah menunjukkan bahwa sistem elektronik seperti e-payment terbukti efektif dalam mempercepat proses pencairan dana, mengurangi kelengkapan dokumen yang tidak akurat, serta menekan kesalahan administratif (Ghozali et al., 2018).

Di sektor konstruksi publik, keterlambatan pembayaran juga sering disebabkan oleh komunikasi yang kurang optimal, dokumentasi tidak lengkap, dan prosedur birokrasi yang kompleks (Mardhiyah, Hidayat, & Ophiyandri, 2025). Studi internasional mendukung temuan serupa, mencatat bahwa permintaan pembayaran tanpa dokumen pendukung yang memadai, multi-level review, dan prosedur birokrasi panjang menjadi faktor utama keterlambatan (Adaku et al., 2023; Chadee et al., 2023).

Tabel 1. Faktor-faktor Umum Keterlambatan Prosedur Pembayaran Publik

Faktor Penyebab	Sumber Temuan
Dokumen pendukung tidak lengkap	Ghozali et al. (2018), Ghozali et al. (2018)
Prosedur birokrasi kompleks	Adaku et al. (2023), Chadee et al. (2023)
Komunikasi antar pihak lemah	Ghozali et al. (2018), Adaku et al. (2023)
Dokumentasi serta tata kelola administrasi kurang efektif	Mardhiyah et al. (2025)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Fenomena tersebut memperlihatkan pola yang konsisten: ketidakefisienan sistem administrasi dan prosedur yang panjang dapat mengganggu efisiensi pencairan anggaran publik. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mendalami prosedur SPM di Dinas PUPR Provinsi, sehingga studi ini penting untuk mengisi celah kebijakan dan praktik yang lebih baik.

Penelitian ini penting karena memperdalam pemahaman mengenai hambatan dalam prosedur penerbitan SPM di sektor publik—terlebih di Dinas PUPR Provinsi, yang memiliki peran

strategis pada pembangunan infrastruktur daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk merancang intervensi manajerial yang lebih efektif melalui pelatihan teknis, perbaikan koordinasi internal, dan penerapan sistem informasi keuangan modern. Dengan demikian, diharapkan proses pencairan anggaran menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel—mendukung pencapaian target pembangunan dan pemanfaatan anggaran secara optimal di tingkat daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah pertanyaan utama yang akan dicermati sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan SPM berlangsung di Dinas PUPR Provinsi?
2. Apa saja kendala utama—termasuk administratif, komunikasi, dan sumber daya manusia—dalam proses penerbitan SPM tersebut?
3. Bagaimana pengaruh kendala tersebut terhadap efektivitas dan waktu penyelesaian penerbitan SPM?
4. Apa rekomendasi strategis yang dapat diusulkan untuk memperbaiki prosedur penerbitan SPM demi meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah?

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Keuangan Sektor Publik

Manajemen keuangan sektor publik merupakan proses pengelolaan keuangan negara/daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Tujuan utamanya adalah mendukung efektivitas penggunaan dana publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2022). Dalam konteks organisasi publik, perencanaan dan pengawasan keuangan yang baik dapat mencegah pemborosan, meningkatkan transparansi, dan menjamin akuntabilitas (Harahap, 2021).

Menurut Brigham dan Houston (2022), manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada pengambilan keputusan strategis terkait penggunaan dana dan pengelolaan risiko. Dalam sektor publik, aspek ini diterjemahkan ke dalam prinsip tata kelola

keuangan daerah yang efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Surat Perintah Pembayaran (SPP) merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pencairan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah. Proses penerbitan SPP dimulai dari penyusunan dokumen permintaan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pemeriksaan oleh bendahara, pengesahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga penginputan data ke sistem keuangan pemerintah daerah sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Widodo (2021) menegaskan bahwa prosedur ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan. Prosedur yang baik menjamin bahwa setiap pembayaran telah diverifikasi secara administratif maupun teknis, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Suryani (2021) menambahkan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) penerbitan SPP menjadi indikator penting untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola keuangan publik. Tanpa prosedur baku yang dijalankan dengan konsisten, risiko keterlambatan, kesalahan pencairan, bahkan penyimpangan anggaran akan meningkat.

Faktor Penghambat Prosedur Penerbitan SPP

Berbagai penelitian menemukan faktor penghambat dalam penerbitan SPP. Ghazali, Purwanto, dan Januarti (2018) menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan anggaran kerap disebabkan oleh dokumen tidak lengkap, lemahnya pemahaman aparatur terhadap sistem keuangan, dan prosedur birokrasi yang panjang. Hal ini senada dengan temuan Adaku et al. (2023) yang menyoroti kompleksitas administrasi serta koordinasi antarunit sebagai faktor utama keterlambatan pencairan dana proyek publik.

Di sisi lain, Mardhiyah, Hidayat, dan Ophiyandri (2025) menemukan bahwa dalam proyek konstruksi pemerintah, kendala administratif dan lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan sering memperlambat proses pembayaran. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan

teknologi informasi yang memadai sangat penting untuk memperbaiki alur penerbitan SPP.

Upaya Peningkatan Efektivitas Penerbitan SPP

Upaya perbaikan prosedur penerbitan SPP dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem digital, serta perbaikan koordinasi antarunit kerja. Chadee et al. (2023) menyarankan penggunaan sistem keuangan berbasis digital yang terintegrasi sebagai solusi untuk mengurangi human error dan mempercepat proses verifikasi dokumen.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai menjadi langkah penting agar mereka memahami SOP serta regulasi keuangan terbaru (Putri, 2021). Peningkatan kapasitas SDM akan mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami proses, hambatan, serta interaksi antar aktor dalam konteks yang alami (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran faktual mengenai fenomena tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, sehingga penelitian lebih menekankan pada makna dan interpretasi data lapangan (Sugiyono, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses administrasi keuangan di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah. Mengingat keterbatasan waktu dan kebutuhan fokus pada aktor kunci, penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penerbitan SPM. Informan terdiri atas pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, staf verifikasi, serta pejabat pelaksana teknis kegiatan. Total informan dalam penelitian ini adalah lima orang. Menurut Etikan, Musa, dan Alkassim (2016), purposive sampling sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif karena

memungkinkan pemilihan responden yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, yang berlokasi di ibu kota provinsi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis instansi tersebut dalam pembangunan infrastruktur dan tingginya intensitas transaksi keuangan yang melibatkan penerbitan SPM. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2025. Rentang waktu ini memungkinkan peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen administratif terkait prosedur penerbitan SPM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung alur kerja dan interaksi antarunit dalam proses penerbitan SPM. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap informan kunci untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan hambatan yang mereka hadapi. Dokumentasi meliputi analisis dokumen resmi, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan gubernur, arsip permohonan, dan realisasi SPM. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Denzin, 2017).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dan membuang data yang tidak relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan dalam prosedur penerbitan SPM di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling,

yaitu pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah. Karakteristik responden ditunjukkan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan/Posisi	Lama Bekerja	Pendidikan Terakhir	Keterlibatan dalam Proses SPM
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	12 tahun	S2 Akuntansi	Verifikasi dokumen keuangan
2	Bendahara Pengeluaran	10 tahun	S1 Ekonomi	Pengelolaan kas dan penerbitan SPM
3	Staf Verifikator (1)	8 tahun	S1 Administrasi	Pemeriksaan kelengkapan administrasi
4	Staf Verifikator (2)	7 tahun	D3 Akuntansi	Pemeriksaan teknis dokumen
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	11 tahun	S1 Teknik Sipil	Penyusunan dokumen pendukung SPM

Sumber: Data primer wawancara (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun, sehingga dapat dianggap memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur administrasi keuangan, khususnya penerbitan SPM.

Ringkasan Hasil Wawancara

Hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan adanya kesesuaian pola temuan pada tiga aspek utama penelitian: prosedur, hambatan, dan upaya perbaikan. Ringkasan hasil wawancara ditampilkan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Penelitian

Fokus Pertanyaan Penelitian	Ringkasan Jawaban Informan
Prosedur penerbitan SPM	Dimulai dari pengajuan dokumen oleh unit kerja, verifikasi administrasi dan teknis, persetujuan pejabat berwenang, hingga penerbitan SPM. Seluruh tahap mengacu pada SOP yang berlaku.
Hambatan prosedur SPM	Ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan pengajuan, kurangnya pemahaman regulasi oleh pegawai, keterbatasan SDM, serta kendala dalam penggunaan sistem informasi keuangan.

Fokus Pertanyaan Penelitian	Ringkasan Jawaban Informan
Upaya mengatasi hambatan	Pelatihan rutin bagi pegawai, penguatan koordinasi antarunit, digitalisasi dokumen, dan pengawasan yang lebih ketat agar sesuai regulasi.

Sumber: Data hasil wawancara (2025)

Ringkasan ini memperlihatkan konsistensi pernyataan antarresponden terkait alur prosedur yang telah sesuai regulasi, namun masih menghadapi kendala administratif dan teknis yang signifikan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan SPM di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah secara formal telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri dan peraturan internal pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kerangka prosedural yang jelas, mulai dari tahap pengajuan dokumen, verifikasi, hingga penerbitan SPM. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa prosedur standar dalam penerbitan SPM berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal agar anggaran digunakan sesuai ketentuan (Widodo, 2021; Suryani, 2021).

Namun, hambatan yang ditemukan—seperti ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan pengajuan, serta keterbatasan SDM—menunjukkan adanya gap antara prosedur normatif dan implementasi di lapangan. Hambatan tersebut selaras dengan temuan Ghozali et al. (2018) yang mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan pemahaman regulasi sebagai faktor utama keterlambatan pencairan anggaran. Hambatan SDM dan keterbatasan teknologi informasi juga sejalan dengan penelitian Adaku et al. (2023) yang menekankan pentingnya kapasitas aparatur dan sistem digital dalam mendukung efisiensi administrasi keuangan publik.

Upaya yang telah dilakukan Dinas PUPR, seperti pelatihan pegawai, peningkatan koordinasi, dan optimalisasi digitalisasi dokumen, merupakan langkah penting untuk mengatasi kendala tersebut. Inisiatif ini juga sesuai dengan rekomendasi Chadee et al. (2023) yang menekankan pentingnya integrasi sistem keuangan digital untuk mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses verifikasi.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan: (1)

Prosedur penerbitan SPM berjalan sesuai regulasi, (2) Hambatan utama terletak pada aspek administrasi, keterlambatan, dan keterbatasan SDM, serta (3) Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan koordinasi, dan digitalisasi sistem keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan regulasi, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi administratif dan teknis, persetujuan pejabat berwenang, hingga penerbitan SPM. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan pengajuan oleh unit kerja, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi, serta kendala dalam penggunaan sistem informasi keuangan. Hambatan-hambatan tersebut berkontribusi pada keterlambatan proses pencairan anggaran yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang dilakukan Dinas PUPR untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan koordinasi antarunit, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta penerapan pengawasan internal yang lebih ketat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan sistemik dan berkelanjutan diperlukan agar penerbitan SPM dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. **Peningkatan Kapasitas Aparatur**
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program pelatihan teknis berkala terkait manajemen keuangan dan regulasi terbaru, agar aparatur memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola proses administrasi keuangan.

2. **Penguatan Sistem Informasi Keuangan**
Penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi harus ditingkatkan untuk meminimalisasi human error, mempercepat proses verifikasi dokumen, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
3. **Perbaikan Mekanisme Koordinasi**
Dinas PUPR perlu membangun forum koordinasi rutin antarunit, terutama antara bidang teknis, keuangan, dan verifikasi, sehingga hambatan administratif dapat diminimalisasi melalui komunikasi yang lebih intensif.
4. **Pengawasan dan Evaluasi Internal**
Penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang lebih sistematis perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan prosedur sesuai SOP. Evaluasi berkala juga akan membantu mengidentifikasi kelemahan serta memberikan umpan balik perbaikan secara cepat.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, diharapkan prosedur penerbitan SPM di Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini penting untuk mendukung pencairan anggaran yang tepat waktu, sehingga proses pembangunan infrastruktur daerah tidak terhambat dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaku, E., Owusu-Manu, D., Agyekum, K., & Edwards, D. (2023). Delays in the processing of interim payment certificates in construction projects. *Buildings*, 13(6), 1792.
<https://doi.org/10.3390/buildings13061792>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of financial management* (16th ed.). Cengage Learning.
- Chadee, A., Wilson, C., & Rahman, M. (2023). Managing payment delays in public sector construction projects. *International Journal of Project Management*, 41(2), 215–227.
<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2023.01.005>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Ghozali, I., Purwanto, A., & Januarti, I. (2018). Willingness to adopt an e-payment system to increase the effectiveness of budget disbursement in the public sector in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(24), 79–86.
- Harahap, S. S. (2021). *Manajemen keuangan sektor publik*. Rajawali Pers.
- Kambu, F. E. H., Asri, Haeranih, & Yertas, M. (2025). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 78–86.
<https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.326>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147.
<https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mardhiyah, F., Hidayat, B., & Ophiyandri, T. (2025). Causes of payment delays in Indonesian public construction projects. *Journal of Civil Engineering and*

- Vocational Education*, 14(1), 23–32.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Mendaun, N. K., Lambe, K. H. P., & Malissa, M. (2025). Peran Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 116–124. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/997>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putri, A. (2021). Implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam pengelolaan anggaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–54.
- Roreng, P. P., Halik, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic Literature Review : Kondisi Makroekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 56–67. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.306>
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suryani, R. (2021). Standard operating procedures in public financial management. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(1), 11–20.
- Widodo, A. (2021). The role of payment orders in local financial management. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Daerah*, 4(3), 99–110.